

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif maka diperlukan perencanaan yang baik yang dapat memberikan arah kebijakan yang jelas dalam kurun waktu yang ditentukan. Arah kebijakan perlu disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada antara lain permasalahan, potensi, peluang serta tantangan kedepan yang akan dihadapi. Untuk hal tersebut maka diperlukan sebuah rencana strategis. Mengacu Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, Rencana strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen bagi sebuah organisasi yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan wajib dan/ urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 2019-2024 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah adalah persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, penetapan Renstra.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Daerah dalam komunikasi dan informasi kepada pihak terkait baik di dalam organisasi pemerintahan maupun diluar organisasi pemerintahan (masyarakat).

Muatan dalam kegiatan ini adalah terkomunikasinya informasi-informasi kinerja pemerintahan melalui berbagai saluran secara masif pada berbagai media baik cetak, elektronik maupun tatap muka yang muaranya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan itu perencanaan sumber daya, baik manusia maupun infrastruktur, tata kelola dan operasionalnya perlu disusun dan dijabarkan secara bertahap melalui program dan kegiatan dengan memperhatikan permasalahan, potensi, peluang serta tantangan kedepan dengan target tertentu yang harus ditetapkan. Dalam hal ini keterkaitan dengan perencanaan jangka menengah (RPJM) baik yang ada pada Pemerintah Pusat baik yang makro maupun khusus pada Kementerian/Lembaga terkait, Provinsi, Daerah Kabupaten dan rencana kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten menjadi acuan agar tidak terjadi tumpang tindih serta dapat menjadi faktor pendorong percepatan terhadap sasaran, target, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang.

Selanjutnya rencana strategis Diskominfo Kabupaten Magelang tahun 2019 -2024 ini akan menjadi pedoman operasional dalam penyusunan rencana kerja (renja) Diskominfo Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika selama lima tahun dan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja PD.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor.....
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
19. Perda RPJMD.....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah untuk memberikan arah atau panduan bagi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tugas dan fungsinya untuk jangka menengah dan adanya keterpaduan dalam kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Diskominfo dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta untuk megoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja (renja) Diskominfo Kabupaten Magelang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis dilengkapi dengan pengertian dan fungsi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Diskominfo Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Diskominfo Kabupaten Magelang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Dalam bab ini, diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Renstra Diskominfo Kabupaten Magelang, telaah Visi, Misi dan Program Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Magelang beserta indikator kinerjanya.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Magelang selama lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang termasuk indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang secara umum memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh informasi dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun tatap muka. Pada dasarnya semua tugas fungsi tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut telah tersedia sumberdaya manusia maupun peralatan yang cukup memadai yang dapat diketahui dari capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya meningkatnya akses komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah melalui media elektronik.

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang masih ada hambatan yang dihadapi. Hambatan utama dalam proses komunikasi dan informasi adalah belum semua data informasi terstruktur dengan baik sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Kendala ini lebih disebabkan pada kemampuan dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang berbeda dari segi sumber daya manusia dan prasarana sarana serta regulasi yang masih belum memadukan dalam hal data informasi yang diperlukan dengan sistem satu data.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dengan struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan uraian tugasnya, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:



### 2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### 2.1.2. Uraian Tugas

#### a. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

##### a.1. Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada pimpinan.

##### a.2. Uraian Tugas:

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan di bidang sumber daya informatika.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi publik.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan di bidang aplikasi informatika dan statistik sektoral.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.

- 9) Menyelenggarakan fasilitasi bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik sektoral.
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi. data. dan informasi di bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik sektoral.
- 11) Menyelenggarakan pelayanan di bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik sektoral.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik sektoral.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 14) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan. pengendalian. evaluasi. dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**b.1. Tugas**

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi perumusan konsep kebijakan. pengkoordinasian. pelaksanaan. pengadministrasian. pemantauan. evaluasi. dan pelaporan bidang perencanaan program. penatausahaan keuangan. pengelolaan umum dan kepegawaian. dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b.2. Uraian Tugas**

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program. kegiatan. rencana kerja. dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

- 2) Membagi tugas. mendelegasikan wewenang. memberi petunjuk. dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan. pembinaan. fasilitasi. verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program. kegiatan. rencana kerja. dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan. pembinaan. fasilitasi. verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan. evaluasi. pelaporan. pelaksanaan program. kegiatan. dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan. pembinaan. fasilitasi. verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan. pembinaan. fasilitasi. verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian. ketatausahaan. pengelolaan barang milik daerah. kerumahtanggaan. kelembagaan. ketatalaksanaan. kehumasan. dokumentasi. kerjasama. hukum.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan. pemeliharaan. pengelolaan. pembinaan. fasilitasi dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi. data. informasi dan publikasi bidang komunikasi dan informatika. statistik. dan persandian.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian. keuangan. dan administrasi umum Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan. pengendalian. evaluasi. dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA INFORMATIKA

c.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Informatika yang meliputi perumusan konsep kebijakan. pengkoordinasian. pelaksanaan. pengadministrasian. pemantauan. evaluasi. dan pelaporan bidang layanan persandian. telekomunikasi. infrastruktur jaringan informatika. dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c.2. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program. kegiatan. rencana kerja. dan anggaran Bidang Sumber Daya Informatika.
- 2) Merumuskan konsep kebijakan daerah. pedoman pelaksanaan. dan pedoman teknis bidang layanan infrastruktur dasar *data center*. *disaster recovery center*. teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah. layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan

akses *internet*. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah. integrasi layanan publik dan pemerintahan. serta layanan persandian.

- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan infrastruktur dasar *data center* dan *disaster recovery center*.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses *internet*.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan integrasi layanan publik dengan pemerintahan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan informatika.
- 10) Melaksanakan verifikasi pengelolaan data dan informasi di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan informatika.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Sumber Daya Informatika.

- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemantauan. pengendalian. evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Informatika.
- 14) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

##### d.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang meliputi perumusan konsep kebijakan. pengkoordinasian. pelaksanaan. pengadministrasian. pemantauan. evaluasi. dan pelaporan bidang layanan informasi publik. komunikasi publik. dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### d.2. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program. kegiatan. rencana kerja. dan anggaran Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 2) Merumuskan konsep kebijakan daerah. pedoman pelaksanaan. dan pedoman teknis di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah. pelayanan informasi publik. penyediaan konten lintas sektoral. pengelolaan media komunikasi publik. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. dan penyediaan.
- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan informasi.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.

- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan penyediaan akses.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan akses bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah. pelayanan informasi publik. penyediaan konten lintas sektoral. pengelolaan media komunikasi publik. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. dan penyediaan akses informasi..
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan administrasi. data. dan informasi di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah. pelayanan informasi publik. penyediaan konten lintas sektoral. pengelolaan media komunikasi publik. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. dan penyediaan akses informasi.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang layanan informasi publik dan komunikasi publik.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian. keuangan. dan administrasi umum Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan. pengendalian. evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIKA

e.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Statistika yang meliputi perumusan konsep kebijakan. pengkoordinasian. pelaksanaan. pengadministrasian. pemantauan. evaluasi. dan pelaporan bidang aplikasi informatika. statistik. dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e.2. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program. kegiatan. rencana kerja. dan anggaran Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 2) Membagi tugas. mendelegasikan wewenang. memberi petunjuk. dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah. pedoman pelaksanaan. dan pedoman teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi. layanan keamanan informasi e-Government. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga. pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten. pengembangan sumber daya TIK Smart City. layanan manajemen data dan informasi.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan keamanan informasi e-Government.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan dan pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah .
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-Government.



- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan statistik.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang aplikasi informatika dan statistik.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi. data. dan informasi di bidang aplikasi informatika dan statistik.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang aplikasi informatika dan statistik.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian. keuangan. dan administrasi umum Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan. pengendalian. evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3. Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. statistik dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;

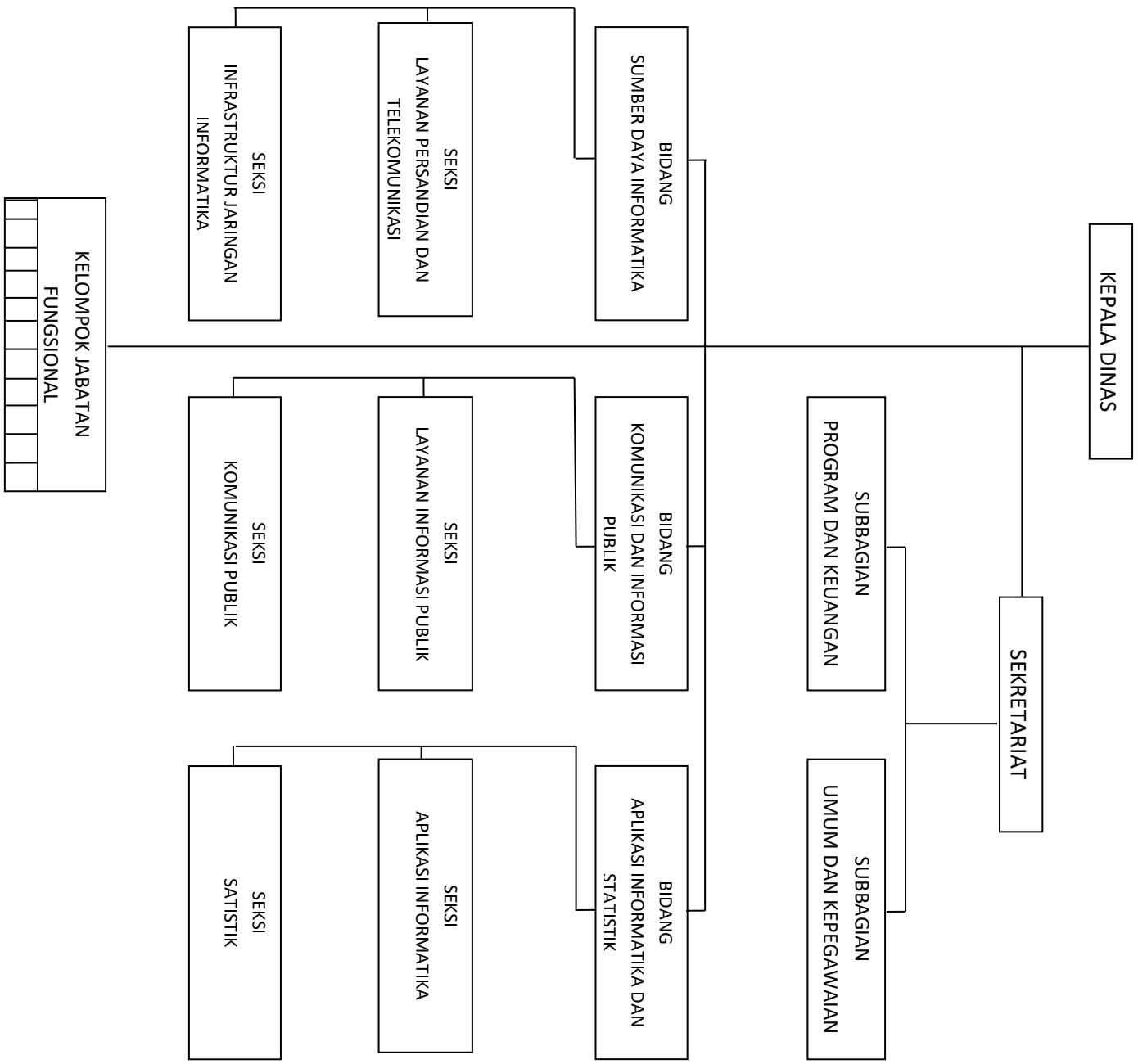
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika. komunikasi. informasi publik. aplikasi informatika. persandian. dan statistik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.4. Struktur Organisasi:

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat. membawahi:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Informatika. membawahi:
  - 1. Seksi Layanan Persandian dan Telekomunikasi; dan
  - 2. Seksi Infrastruktur Jaringan Informatika.
- d. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. membawahi:
  - 1. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
  - 2. Seksi Komunikasi Publik.
- e. Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik. membawahi:
  - 1. Seksi Aplikasi Informatika; dan
  - 2. Seksi Statistik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang perlu didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sebanyak 36 (tiga puluh enam)

orang. yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang terdapat 10 jabatan struktural baik eselon II. III maupun eselon IV. Secara rinci SDM Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
SDM Diskominfo berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	2		3	4	5
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	0	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	2	3
		Kepala Sub.Bid / Sub Bagian	IV.A	7	8
2	Fungsional Umum	Staf	-	21	46
3	Fungsional Tertentu	Staf	-	5	28
<b>Jumlah</b>				<b>36</b>	<b>87</b>

Sumber : Sub BaSumber: Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Diskominfo Kabupaten Magelang sebanyak 36 orang. terdiri dari 10 orang pejabat struktural dan 26 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya. SDM pada Diskominfo mayoritas merupakan lulusan S1 (33.34%). sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2  
Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca sarjana (S.2)	5	13.89
2.	Sarjana (S.1)	12	33.34
3.	Diploma 3/Akademi	8	22.22
4.	SLTA	11	30.55

5.	SLTP	0	0
6.	SD	0	0
JUMLAH		36	100.00

Sumber: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019

Sedangkan SDM pada Diskominfo Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya. mayoritas berada pada golongan III sebanyak 55.56% dan golongan II sebanyak 36.11% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	3	8.33
2.	Golongan III	20	55.56
3.	Golongan II	13	36.11
4.	Golongan I	0	0
JUMLAH		36	100.00

Sumber: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender. maka SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang terdapat 23 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 9 pejabat struktural dan 14 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang yang terdiri dari 1 pejabat struktural dan 12 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Magelang Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	9	1
2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	14	12
JUMLAH		23	13

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019

Disamping itu Diskominfo Kabupaten Magelang didukung dengan tenaga Staf Pendukung (Non ASN) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan ASN berlatar belakang IT dan kompetensi khusus lainnya dengan jabatan Pranata Komputer. Tenaga-tenaga tersebut tersebar ke berbagai bidang yang ada dengan penempatan sesuai dengan kemampuannya. sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5  
ASN dengan latar belakang Pendidikan IT

No	Instansi	Jumlah	Pendidikan D3	Pendidikan S1
1	DISKOMINFO	2 orang	2	
2	BKPPD	1 orang	1	
3	BPPKAD	2 orang	1	1
4	BAG ADMIN BANGDA	1 orang	1	
5	BAG HUMAS PROTOKOL	1 orang	1	
6	DISDUKCAPIL	4 orang	3	1
7	DINKES	1 orang	1	
8	DPUPR	2 orang	2	
9	DPMPTSP	2 orang	2	
10	DISDIKBUD	1 orang	1	
11	DIPERINAKER	1 orang	1	
12	KESBANGPOL	1 orang	1	
13	KEC. KALIANGKRIK	1 orang	1	
14	KEC. MUNGKID	1 orang	1	
15	KEC. NGLUWAR	1 orang	1	
16	KEC. SALAM	1 orang	1	
17	KEC. SALAMAN	1 orang	1	
18	KEC. SECANG	1 orang	1	
19	KEC. TEGALREJO	1 orang	1	
20	RSUD MUNTILAN	2 orang	1	1
21	SETWAN	1 orang	1	

Sumber: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019

Tabel 2.6  
Tenaga Non PNS di Diskominfo dan Tingkat Pendidikan

No	Pelaksanaan Tugas	Jumlah	Pendidikan		
			SMA	D3	S1
1	Bidang Sumber daya Informatika	7 orang	-	-	7
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	7 orang	6	-	1
3	Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	7 orang	-	1	6

*Sumber: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian. Diskominfo. 2019*

Berdasarkan kondisi tersebut diatas. maka sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan yaitu berkemampuan dan berjumlah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Untuk hal tersebut maka kedepan diharapkan permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

#### 2.2.2. Prasarana dan Sarana

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. maka Prasarana dan Sarana yang telah dimiliki saat ini sebagaimana dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.  
Sarana dan Prasarana di Diskominfo

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3
1	TANAH	1
2	KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2	16
3	GPS	3
4	RAK BESI / METAL /KAYU	12
5	LEMARI	37
6	FILLING BESI / METAL	14
7	MEJA	73
8	KURSI	158
9	P.C. UNIT	22
10	CPU	74
11	MONITOR	75
12	AC SPLIT/ UNIT	27

13	LAPTOP/ NOTEBOOK	29
14	PRINTER	50
15	SERVER/ MAINFRAME	15
16	UPS	123
17	JARINGAN INTERNET SETDA	1
18	ANTENA WIRELESS	78
19	RADIO WIRELESS	67
20	TOWER	33
21	NETWORK SWITCH	139
22	ROUTER	45
23	GROUNDING/ ANTI PETIR	33
24	STABILIZER	28
25	WALLMOUNT/ RACKMOUNT	53
26	ACCES POINT	67
27	PROTECTION/ TOWER/ LISTRIK	42
28	INSTALASI LAN	6
29	JARINGAN LISTRIK KANTOR-GENSET	2
30	MESIN GENERATOR/GENSET	3
31	TELEVISI	19
32	LCD PROYEKTOR	4
33	PEMANCAR RADIO FM	1
34	INSTALASI KELISTRIKAN LINK PEMANCAR	1
35	MESIN ABSENSI	152
36	JARINGAN FO R.BANGDA-R.BUPATI	2
37	INTERIOR COMMAND CENTER	1
38	CALL CENTER	1
39	STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	2
40	GEDUNG KERJA /SERVER/LPPL	4
41	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bila melihat struktur organisasi maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi perangkat daerah Diskominfo. sehingga



peran dan fungsi Diskominfo saat ini dan dimasa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk mewujudkan pelaksanaan ideal dimaksud, maka pola dan alur kerja di atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka aktualisasi dan orientasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, khususnya dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang merupakan Pembantu Bupati dalam bidang persandian, statistik, komunikasi dan informatika memiliki tujuan “Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan bersih” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat”. Diskominfo telah melaksanakan kegiatan di bidang/urusan tersebut dan memiliki 2 (dua) indikator yang mencakup standart pelayanan minimal (SPM) yang diatur oleh Kementerian Kominfo, yaitu:

- a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi\*\*
- b. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho\*\*

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8. Indikator tujuan, sasaran dan program Diskominfo tersebut sebagian sudah tidak sesuai/selaras dengan tujuan, sasaran RPJMD Kab. Magelang 2019-2024 sehingga indikator tujuan, sasaran dan program Diskominfo yang tertuang dalam Renstra Diskominfo 2019-2024 adalah indikator baru yang sudah disesuaikan dengan indikator Kementerian Kominfo, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kab. Magelang 2019-2024 .

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo**  
**Kabupaten Magelang tahun 2014- 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan pelayanan informasi meningkat **				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Cakupan pengelolaan TI meningkat **				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Cakupan pengembangan komunikasi dan informasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%	0%	1	0	0	0	0
4	Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat				0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0	1	1	1	1
5	Prosentase Aparatur / SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan di bidang TIK				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	0%	100%	100%	0%	0	0	1	1	0

6	Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	77,78 %	77,78 %	77,78 %	77,78 %	77,78 %	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
---	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------	------	------	------

\*\* : terdapat cakupan SPM dalam program

Pada periode Tahun 2014-2016 realisasi pendapatan secara total mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 700.29. Dalam periode tersebut realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.380.965.000.00 dikarenakan adanya kenaikan capaian pendapatan retribusi menara telekomunikasi. sedangkan realisasi pendapatan yang terkecil terjadi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 46.307.000.00. Hal ini menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode 2014-2016 dari aspek peningkatan pendapatan daerah dimana hal ini tentunya ditopang oleh kinerja SDM yang dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, dan disiplin yang lebih dalam pengelolaan pendapatan ke depan agar pertumbuhan pendapatan selalu dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Gambaran tentang anggaran pendapatan dan pengeluaran Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014–2016 dapat diikuti pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	835.000.000	1.035.250.000	50.000.000	1.405.000.000	1.500.000.000	665.875.665	806.293.935	46.307.000	1.380.965.000	1.272.114.731	0,80	0,78	0,93	0,98	0,85	661,39	700,29
Belanja Tidak Langsung	2.373.678.350	2.947.962.000	3.255.462.000	3.198.550.000	3.171.233.922	2.286.391.581	2.801.302.730	3.031.335.90	2.950.763.930	2.957.338.958	0,96	0,95	0,93	0,92	0,93	8,01	7,07
Belanja Langsung	3.652.609.750	3.210.717.850	2.779.931.230	4.457.288.475	5.277.060.000	3.440.718.134	3.074.726.109	2.654.965.262	4.294.229.434	5.087.506.173	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	13,30	13,98
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.714.959.750	2.547.572.750	1.583.892.500	3.118.832.500	4.033.353.000	2.643.931.394	2.486.482.264	1.522.852.373.00	3.022.894.657	3.884.348.626	0,97	0,98	0,96	0,97	0,96	20,56	20,57
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	248.862.000	79.300.000	143.983.500	355.087.000	97.000.000	216.692.400	72.976.290	142.541.060.00	319.922.380	93.934.975	0,87	0,92	0,99	0,90	0,97	21,84	20,70
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	221.988.000	248.398.000	921.571.230	853.368.975	931.707.000	202.931.750	244.407.400	896.658.219.00	825.865.547	896.669.372	0,91	0,98	0,97	0,97	0,96	71,17	72,00
Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	456.800.000	335.447.100	130.484.000	130.000.000	200.000.000	367.217.590	270.860.155	92.913.610.00	125.546.850	197.912.200	0,80	0,81	0,71	0,97	0,99	(8,55)	0,21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000.00	0	0	0	15.000.000	9.945.000	0	0	0	14.641.000	0,99	0,00	0,00	0,00	0,98	(25,00)	(25,00)

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dengan struktur organisasinya yang ada, maka terdapat tugas dan fungsi yang juga selaras dengan sebagian tugas dan fungsi yang dimiliki oleh organisasi pada pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan demikian diperlukan sinkronisasi dan integrasi tugas dan fungsi pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada.

##### 1. Tantangan.

- a. Pesatnya perkembangan TIK perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
- b. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan informasi yang sesuai standart
- c. Data dan aplikasi yang terintegrasi
- d. Ketersediaan data statistik sektoral
- e. Perwujudan layanan komunikasi dan informasi publik yang cepat dan tepat

##### 2. Peluang.

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis elektronik (*e-Government*)
- b. Kebutuhan akan ketersediaan data statistik sektoral untuk masyarakat dan pemerintah
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Magelang
- d. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang, maka peranan Diskominfo sangat penting dalam pengelolaan urusan statistik, persandian dan komunikasi informatika mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut maka penyusunan Rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan e-Government dengan rincian masalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.

##### Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan e-Government	Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	Belum semua Perangkat Daerah (PD), unit kerja PD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil Belum adanya command center Kabupaten Magelang sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan pimpinan Belum tersedianya data center dan Disaster Recovery Center (DRC) yang sesuai dengan standar Belum terpenuhinya kebutuhan mesin absensi elektronik untuk peningkatan kinerja pegawai

		<p>Belum tersedianya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan layanan telekomunikasi kedinasan</p> <p>Masih banyaknya wilayah <i>blank spot</i> di Kabupaten Magelang</p> <p>Belum optimalnya pembinaan dan pelayanan perijinan pembangunan menara telekomunikasi dan pemberian rekomendasi ijin pendirian menara telekomunikasi baru</p> <p>Belum terpenuhinya target pemungutan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi</p>
2	Belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar	<p>Belum semua Perangkat Daerah menggunakan sandi dalam komunikasi</p> <p>Belum adanya SDM persandian</p> <p>Belum optimalnya sarana prasarana persandian</p> <p>Belum tersedianya sistem keamanan jaringan yang sesuai dengan standar</p> <p>Belum terbangunnya tata kelola pemerintahan berbasis persandian</p>
3	Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat	<p>Belum adanya layanan aplikasi berbasis <i>mobile</i> yang terintegrasi</p> <p>Belum optimalnya layanan pengembangan aplikasi terintegrasi pemerintah</p> <p>Belum semua website desa menggunakan domain dengan ekstension <i>desa.id</i> sesuai dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan dan layanan dasar data center dan <i>DRC plan</i></p> <p>Belum adanya pusat layanan <i>data warehouse</i></p> <p>Belum optimalnya akses internet dan intranet</p> <p>Belum adanya peraturan TIK yang disusun</p>
4	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	<p>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan statistika daerah</p> <p>Belum adanya koordinasi terkait pengumpulan data sektoral di PD</p> <p>Belum optimalnya diseminasi data statistik sektoral</p> <p>Terbatasnya SDM di bidang statistik</p>



		Belum adanya tata kelola statistik sektoral		
		Belum tersedianya sarana dan prasarana statistik		
5	Belum optimalnya diseminasi informasi publik	Belum semua PD melaksanakan amanah keterbukaan informasi publik		
		Belum optimalnya pemanfaatan portal informasi daerah <a href="http://magelangkab.go.id">magelangkab.go.id</a> beserta sub-domain PD dan desa/kelurahan sebagai sarana informasi dan komunikasi publik		
		Belum tersedianya pusat layanan informasi publik		
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media radio		
		Perangkat siar LPPL Radio Gemilang sudah tidak memadai		
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media televisi		
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang		
		Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan kemitraan diseminasi informasi publik oleh Forum Komunikasi Media Tradisional melalui Pertunjukan Rakyat		
		Keterbatasan jumlah kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat		
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang dan videotron		
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru portal berita daerah		
		Belum tersedianya <i>media center</i> sebagai media jaringan pemberitaan daerah		
		6	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat	Terbatasnya jumlah lembaga komunikasi perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif
				Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial
Belum tersedianya konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar				

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sebagaimana diketahui bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi dan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan serta program unggulan atau dikenal dengan istilah dasacita.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang masuk dalam misi ke-tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan mendukung untuk terwujudnya cita ke-delapan yaitu birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkannya Dinas Komunikasi dan Informatika harus menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penghambat sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai.

Tabel 3.2.

Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

<b>Visi :“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (Sedaya Amanah)</b>					
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
				<b>Pendorong</b>	<b>Penghambat</b>
1	2	3	4	5	6
Misi Ke- III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah					
Cita Ke- 8 : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan					

1	E-Government/Smart Regency	<p><b>Tugas:</b> membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p><b>Fungsi:</b> a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan; b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; c. Pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Permasalahan Pelayanan Diskominfo</p> <p>a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi</p> <p>b. Belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar</p> <p>c. Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan</p>	<p>1. Komitmen pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Magelang Cerdas; 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik; 3. Kebijakan Pemerintah tentang SPBE/ e-gov, satu data dan keamanan informasi; 4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 5. Infrastruktur IT yang sudah cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Sumber daya yang terbatas; 2. Belum semua perangkat daerah diarahkan untuk berbasis teknologi informasi; 3. Belum adanya sumberdaya manusia bidang statistik; 4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/programmer dan tenaga ahli bidang TI</p>
---	----------------------------	--	---	--	--

2	Peningkatan layanan publik	bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik	Masyarakat d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik e. Belum optimalnya diseminasi informasi publik f. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat	1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi; 2. Kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik	1. Belum terwujudnya budaya IT; 2. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat; 3. Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi
---	----------------------------	---	---	---	---

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pusat Statistik dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3.

Telaah Rencana Strategis Kementerian Kominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran	Tugas dan Fungsi Diskominfo	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	<b>Renstra Kementerian Kominfo:</b> a. Tersedianya	<b>Tugas:</b> membantu Bupati menyelenggarakan urusan	a. Belum optimalnya	a. Kemajuan teknologi komunikasi dan	a. Prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan

<p>2.</p>	<p>infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.</p> <p><b>Renstra BPS:</b></p> <p>a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap data BPS</p> <p>b. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional</p> <p>c. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam sistem statistik nasional</p> <p><b>Renstra BSSN:</b></p> <p>a. Terselenggaranya keamanan siber secara</p>	<p>pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya</p>	<p>prasaran a dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi</p> <p>b. Belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar</p> <p>c. Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat</p> <p>d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik</p> <p>e. Belum optimalnya diseminasi</p>	<p>b. Kebijakan Pemerintah tentang SPBE/ E-Gov, satu data dan keterbukaan informasi publik</p> <p>c. Kepemilikan alat komunikasi oleh masyarakat yang semakin banyak</p> <p>d. Persaingan global</p> <p>e. Infrastruktur IT yang sudah cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah</p>	<p>n tugas dan fungsi belum memadai</p> <p>b. Belum adanya sistem satu data untuk mengintegrasikan data sektoral</p> <p>c. Belum terwujudnya budaya IT</p>
<p>3.</p>					

4.	<p>andal. Profesional dan terpercaya</p> <p>b. Terselenggaranya</p> <p>a. pendayagunaan kapabilitas identifikasi dan deteksi yang andal</p> <p>c. Terselenggaranya</p> <p>a. pengembangan kapabilitas proteksi yang optimal</p> <p>d. Terselenggaranya</p> <p>a. pendayagunaan kapabilitas penanggulangan dan pemulihan yang kapabel</p> <p>e. Terselenggaranya</p> <p>a. pendayagunaan kapabilitas pemantauan dan pengendalian yang profesional</p> <p>f. Terselenggaranya</p> <p>a. pengelolaan sdm, organisasi dan tata kelola yang kompeten</p> <p><b>Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah:</b></p> <p>a. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Meningkatnya pemanfaatan</p>	<p>informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>e. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>f. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p>	<p>i informasi publik</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat</p>		
----	---	--	---	--	--

	data dan informasi statistik sektoral				
	c. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				

Sebagaimana tabel 3.3. diatas, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sangat mendukung ditingkat lokal terhadap suksesnya sasaran renstra Kementerian dan Lembaga diatas dengan catatan permasalahan dan faktor penghambat dapat diatasi secara bersama-sama/bersinergi.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup pola ruang dan struktur ruang di Kabupaten Magelang. RTRW digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap ruang. Demikian pula Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada RTRW yang berlaku yaitu Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Selain RTRW Kabupaten Magelang, hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo adalah isu strategi dan hasil rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dari Pelayanan Diskominfo Kabupaten Magelang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4.  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW	<b>Tugas:</b> membantu Bupati		1. Komitmen pemangku	1. Prasarana
	-				

B	Struktur Ruang RTRW	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.		kepentingan dalam membangun Kabupaten Magelang Cerdas; 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik; 3. Kebijakan Pemerintah tentang SPBE/ e-gov, satu data dan keamanan informasi; 4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 5. Infrastruktur IT yang sudah cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah.	dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai 2. Belum adanya sistem satu data untuk mengintegrasikan data sektoral 3. Belum terwujudnya budaya IT
	Pasal 16. Kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berupa peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten		Belum optimalnya diseminasi informasi publik		
	Untuk mendukung perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana pasal 56, meliputi: a. Peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat; b. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi serta mendorong terbentuknya jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah kabupaten	<b>Fungsi:</b> a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan; b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; e. Pelaksanaan	Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi		
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis				
1	Perlunya meningkatkan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet		a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang	1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi; 2. Kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik	



2	Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon belum tercapai.	evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik	memenuhi standar komunikasi informasi; b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat			
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet belum tercapai					
4	Perlunya meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya			a. Belum optimalnya diseminasi informasi publik; b. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat		
B	Skenario dan Rekomendasi					
1	Meningkatkan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet					
2	Meningkatkan persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon belum tercapai					
3	Meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses internet belum tercapai					
4	Meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya					

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang statistik persandian, komunikasi dan informatika di daerah, maka setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Diskominfo Kabupaten Magelang maka ke depan dapat

disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan implementasi *e-Government* ( SPBE )
2. Pengembangan *data center* yang didukung jaringan komunikasi data yang aman
3. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah
4. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

Kedepannya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Magelang tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kabupaten Magelang saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep Kabupaten Magelang *Smart city*. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Kabupaten Magelang *Smart City* juga akan menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas/tertata dan nyaman bagi siapa saja. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik guna mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tata kelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Magelang, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2019–2024 adalah meningkatnya pelaksanaan e-government. Secara rinci, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ditampilkan pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo  
Kabupaten Magelang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis								

	teknologi informasi dan komunikasi		Elektronik)								
		Meningkatnya pelaksanaan e-government	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	39.09	49.51	57.32	65.79	74.60	82.40	94.00	94.00
			Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD	40.44	41.32	48.16	56.89	70.23	84.67	98.32	98.32
			Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	22.50	56.94	77.67	81.66	87.56	90.63	94.15	94.15
			Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	62.50	66.67	75.00	83.33	91.67	95.83	100.00	100.00

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Adapun arah kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ditampilkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten  
Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar komunikasi informasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana TIK
			Meningkatkan upaya fasilitasi pelayanan pembangunan menara telekomunikasi
		Penyediaan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi
		Pengintegrasian sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan aplikasi e Government yang terintegrasi
		Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data statistik daerah
		Peningkatan diseminasi informasi publik	Meningkatkan upaya layanan keterbukaan informasi publik
	Meningkatkan pengelolaan saluran media informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Magelang		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat	Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Lembaga Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Magelang

BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu penjabaran operasional secara lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, maka selanjutnya disusun program dan kegiatan yang disertai dengan target indikator dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Diskominfo  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi				Indeks SPBE	1,85 angka (0-5)	1,85 angka (0-5)	2 angka (0-5)	12.210.000	2,1 angka (0-5)	12.349.300	2,3 angka (0-5)	13.038.230	2,5 angka (0-5)	13.993.553	3 angka (0-5)	14.877.408	3 angka (0-5)	66.468.491	66.468.491
	Meningkatkan pelaksanaan e-governmen			Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	31,28 persen	37,26 persen	44,52 persen	12.210.000	52,44 persen	12.349.300	61,56 persen	13.038.230	67,81 persen	13.993.553	76,67 persen	14.877.408	76,67 persen	66.468.491	66.468.491
				Cakupan layanan informasi	40,44 persen	41,32 persen	48,16 persen		56,89 persen		70,23 persen		84,67 persen		98,32 persen		98,32 persen		



				bagi Desa dan SKPD														
				Caku pan layan an dan disem inasi infor masi publi k	36,67 perse n	57,36 perse n	83,94 perse n		87,74 perse n		89,88 perse n		92,02 perse n		94,15 perse n		94,15 perse n	
				Caku pan pema nfaata n dan penge lolaan TI	62,50 perse n	66,67 perse n	75,00 perse n		83,33 perse n		91,67 perse n		95,83 perse n		100 perse n		100 perse n	
		<b>2.10.2</b>	<b>Progr</b>	Perse ntase keterc apaia n pelay anan umu m dan kepeg awaia n peran gkai daera h	100%	100%	100%	1.207 .000. 000	100%	1.055 .000. 000	100%	1.205 .000. 000	100%	1.485 .000. 000	100%	1.308 .000. 000	100%	6.260 .000. 000
		<b>.10.1.</b>	<b>Manaj</b>															
		<b>1.7</b>	<b>emen</b>															
			<b>Admi</b>															
			<b>nistra</b>															
			<b>si</b>															
			<b>Pelay</b>															
			<b>anan</b>															
			<b>Umu</b>															
			<b>m</b>															
			<b>dan</b>															
			<b>Kepe</b>															
			<b>gawai</b>															
			<b>an</b>															
			<b>Peran</b>															
			<b>gkat</b>															
			<b>Daera</b>															
			<b>h</b>															
		<b>2.10.2</b>	<b>Penge</b>	Jumla h surat yang dikelo la	0 surat	0 surat	1500 surat	37.00 0.000	1600 surat	40.00 0.000	1650 surat	45.00 0.000	1650 surat	50.00 0.000	1700 surat	53.00 0.000	1700 surat	225.0 00.00 0
		<b>.10.1.</b>	<b>lolaan</b>															
		<b>1.7.1</b>	<b>Surat</b>															
			<b>Meny</b>															
			<b>urat,</b>															

			<b>Kearsipan dan Bahan Pustaka</b>															
		<b>2.10.2</b>	<b>Penyelesaian Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah</b>	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali	70 kali	170.000.000	75 kali	195.000.000	75 kali	215.000.000	75 kali	235.000.000	75 kali	255.000.000	370 kali	1.070.000.000
		<b>.10.1.1.7.2</b>		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali	320 kali		320 kali		320 kali		320 kali		320 kali		1600 kali	
				3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	0 kali	0 kali	35 kali		35 kali		35 kali		35 kali		35 kali		35 kali	

		<b>2.10.2 .10.1. 1.7.3</b>	<b>Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya</b>	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket	250.000.000	0 paket	250.000.000	1 paket	370.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	4 paket	1.570.000.000
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
		<b>2.10.2 .10.1. 1.7.4</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah</b>	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	0 M2	0 M2	3000 M2	240.000.000	3000 M2	255.000.000	3000 M2	260.000.000	3000 M2	270.000.000	3000 M2	280.000.000	3000 M2	1.305.000.000

			<b>Dinas / Gedung Pemerintahan Lainnya</b>															
				2. Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar	0 rekening bulan	0 rekening bulan	48 rekening bulan		48 rekening bulan		48 rekening bulan		48 rekening bulan		48 rekening bulan		48 rekening bulan	
		<b>2.10.2.10.1.1.7.5</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas / Gedung Pemerintahan Lainnya</b>	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 paket alat	0 paket alat	3 paket alat	310.000.000	3 paket alat	315.000.000	3 paket alat	315.000.000	3 paket alat	330.000.000	3 paket alat	370.000.000	15 paket alat	1.640.000.000
				2. Jumlah perlengkapan	0 jenis	0 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis	

				n yang dipelihara														
				3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	0 buah	0 buah	4 buah		4 buah		4 buah		4 buah		4 buah		4 buah	
				4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	0 buah	0 buah	12 buah		12 buah		12 buah		12 buah		12 buah		12 buah	
		<b>2.10.2</b>	<b>Rehabilitasi</b>	Jumlah paket rehabilitasi sedan/berat gedung/kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintahan Lainnya	0 paket	0 paket	2 paket	200.00.000	2 paket	250.00.000	0 paket	0	2 paket	250.00.000 (geser th. 2021)	0 paket	0	4 paket	450.00.000

		<b>2.10.2 .10.1. 1.7.7</b>	<b>Penin gkata n Kapas itas dan Disipl in Apara tur Sipil Negar a</b>	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		<b>2.10.2 .10.1. 1.8</b>	<b>Progr am Peren canaa n, Keua ngan dan Evalu asi Kiner ja Peran gkat Daera h</b>	Perse ntase keterc apaia n, peren canaa n, evalu asi kinerj a OPD, dan keuan gan peran gkat daera h	100%	100%	100%	130.0 00.00 0	100%	120.0 00.00 0	100%	135.0 00.00 0	100%	125.0 00.00 0	100%	140.0 00.00 0	100%	650.0 00.00 0
		<b>2.10.2 .10.1. 1.8.1</b>	<b>Penye diaan Jasa Admi nistra si Keua ngan</b>	1. Jumla h kegiat an yang dikelo la	0 kegia tan	0 kegia tan	35 kegia tan	70.00 0.000	35 kegia tan	70.00 0.000	35 kegia tan	75.00 0.000	35 kegia tan	75.00 0.000	35 kegia tan	80.00 0.000	35 kegia tan	370.0 00.00 0
				2. Jumla h lapora n keuan gan	0 doku men	0 doku men	8 doku men		8 doku men		8 doku men		8 doku men		8 doku men		8 doku men	

				yang tersusun														
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.8.2</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran gkat Daerah</b>	1. Jumlah dokumen Renstra Peran gkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	10.00 0.000	1 dokumen	10.00 0.000	1 dokumen	10.00 0.000	1 dokumen	10.00 0.000	1 dokumen	10.00 0.000	5 dokumen	50.00 0.000
				2. Jumlah dokumen Renja Peran gkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen	
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.8.3</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Peran gkat Daerah</b>	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	10.00 0.000	4 dokumen	10.00 0.000	4 dokumen	10.00 0.000	4 dokumen	10.00 0.000	4 dokumen	10.00 0.000	20 dokumen	50.00 0.000

				2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen
				3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen
				4. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen



		<b>2.10.2 .10.1. 1.8.4</b>	<b>Peny usuna n Doku men Norm a, Stand ar, Prose dur dan Kriter ia Peran gkat Daera h</b>	1. Jumla h Stand ar Opera sional Prose dur yang tersus un	0 SOP	0 SOP	4 SOP	40.00 0.000	4 SOP	30.00 0.000	4 SOP	40.00 0.000	4 SOP	30.00 0.000	4 SOP	40.00 0.000	4 SOP	180.0 00.00 0
				2. Jumla h doku men data peran gkat daera h yang tersus un	0 doku men	0 doku men	1 doku men		0 doku men		1 doku men		0 doku men		1 doku men		3 doku men	
		<b>2.10.2 .10.1. 1.19</b>	<b>Progr am Penge mban gan Saran a Prasa rana Tekn ologi Infor masi dan Komu nikas i</b>	1. Caku pan SKPD dan Desa/ Kelur ahan terfasi litasi jaring an komu nikasi data yang optim	20,84 %	36,77 %	48.48 %	5.113 .000. 000	60.19 %	5.139 .300. 000	71.90 %	5.353 .230. 000	83.61 %	5.808 .553. 000	100%	6.569 .408. 300	100%	27.98 3.491 .300

				al dan stabil														
				2. Cakupan Layanan Komunikasi	73%	75%	75%		77%		80%		80%		82%		82%	
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.19.1</b>	<b>Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intrapemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK</b>	1. OPD, unit kerja OPD, dan Desa/ Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	0 SKPD dan Desa	0 SKPD dan Desa	207 SKPD dan Desa	3.763.000.000	257 SKPD dan Desa	4.139.300.000	307 SKPD dan Desa	4.553.230.000	357 SKPD dan Desa	5.008.553.000	427 SKPD dan Desa	5.509.408.300	427 SKPD dan Desa	22.973.491.300
				2. Jumlah band	260 Mbps	670 Mbps	670 Mbps		700 Mbps		800 Mbps		850 Mbps		900 Mbps		900 Mbps	

				with internet yang disalurkan														
		<b>2.10.2.10.1.1.19.2</b>	<b>Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center</b>	Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK	0 paket layanan	0 paket layanan	3 paket layanan	1.150.000.000	3 paket layanan	800.000.000	3 paket layanan	600.000.000	3 paket layanan	600.000.000	3 paket layanan	860.000.000	3 paket layanan	4.010.000.000
		<b>2.10.2.10.1.1.19.3</b>	<b>Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi</b>	1. Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	0 menara telekomunikasi	0 menara telekomunikasi	223 menara telekomunikasi	200.000.000	223 menara telekomunikasi	200.000.000	223 menara telekomunikasi	200.000.000	223 menara telekomunikasi	200.000.000	223 menara telekomunikasi	200.000.000	223 menara telekomunikasi	1.000.000.000
				2. Jumlah provider	0 provider	0 provider	15 provider		15 provider		15 provider		15 provider		15 provider		15 provider	

				mena ra yang retrib usiny a terpu ngut														
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.21</b>	<b>Progr am Penge lolaan n Aplik asi Infor matik a</b>	1. Perse ntase urusa n yang terint egrasi dalam penge lolaan BIG DATA	21,05 %	23,68 %	34.21 %	395.0 00.00 0	50%	425.0 00.00 0	68.42 %	445.0 00.00 0	89.47 %	450.0 00.00 0	100%	460.0 00.00 0	100%	2.175 .000. 000
				2. Perse ntase layan an domai n dan subdo main pemer intah	0.27 %	0.27 %	10.27 %		20.68 %		42.26 %		64.52 %		94.96 %		94.96 %	
				3. Perse ntase keters ediaan doku men peren canaan dan pelap oran kinerj a penge	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

				lolaan TIK														
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.21.1</b>	<b>Fasili</b> <b>tasi</b> <b>penge</b> <b>lolaan</b> <b>aplik</b> <b>asi</b> <b>SKPD</b>	1. Jumla h aplika si SKPD dan desa yang terfasi litasi	0 Aplik asi	0 Aplik asi	6 Aplik asi	330.0 00.00 0	8 Aplik asi	330.0 00.00 0	10 Aplik asi	350.0 00.00 0	12 Aplik asi	350.0 00.00 0	14 Aplik asi	360.0 00.00 0	14 Aplik asi	1.720 .000. 000
				2. Jumla h keters ediaa n doku men peren canaa n dan pelap oran kinerj a penge lolaan TIK	0 doku men	0 doku men	2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men	
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.21.2</b>	<b>Penye</b> <b>lengga</b> <b>raan</b> <b>ekosi</b> <b>stem</b> <b>TIK</b>	1. Jumla h SKPD dan desa yang meng guna kan domai n dan sub domai n	12 SKPD dan Desa	12 SKPD dan Desa	12 SKPD dan Desa	65.00 0.000	21 SKPD dan Desa	95.00 0.000	30 SKPD dan Desa	95.00 0.000	45 SKPD dan Desa	100.0 00.00 0	60 SKPD dan Desa	100.0 00.00 0	60 SKPD dan Desa	455.0 00.00 0

				2. Jumlah desa yang potensial terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang	0 Desa	0 Desa	75 Desa		165 Desa		240 Desa		312 Desa		367 Desa		367 Desa	
				3. Pengelolaan penilaian indeks SPBE	0 indeks	0 indeks	2 indeks		2.1 indeks		2.3 indeks		2.5 indeks		3 indeks		3 indeks	
		<b>2.10.2</b>	<b>Progr</b>	1. Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria	0%	5.81%	13.63%	3.665.000.000	26.45%	3.850.000.000	39.27%	4.050.000.000	52.10%	4.250.000.000	64.92%	4.450.000.000	64.92%	20.265.000.000
		<b>.10.1.</b>	<b>Pengelolaan</b>	2. Persentase diseminasi informasi melalui	70%	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	
		<b>1.23</b>	<b>Informasi dan Komunikasi Publik</b>															

				media mass a													
				3. Caku pan disem inasi infor masi melal ui media pertu njuka n rakya t	25%	66.66 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%
				4. Caku pan disem inasi infor masi melal ui media interp erson al	0%	58.33 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%
				5. Caku pan disem inasi infor masi melal ui media luar ruang	25%	33.33 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%
				6. Caku pan disem inasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

				infor masi melal ui media baru portal berita daera h													
				7. Caku pan Penge mban gan dan pemb erday aan Kelom pok Infor masi Masy araka t di tingka t keca mata n	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
				8. Caku pan Konte n Litera si TIK yang rama h anak, wanit a, disabi litas dan	25%	33,33 %	50%		66.67 %		83.33 %		91.67 %		100%		100%



				pelajar														
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.23.1</b>	<b>Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau</b>	Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Keten-tuan Didingang Cukai Tembakau	0 kali	0 kali	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	500.000.000
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.23.2</b>	<b>Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa</b>	1. Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	0 jam/hari	0 jam/hari	19 jam/hari	2.065.000.000	19 jam/hari	2.250.000.000	19 jam/hari	2.450.000.000	19 jam/hari	2.650.000.000	19 jam/hari	2.850.000.000	19 jam/hari	12.265.000.000
				2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan	

				3. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang	0 eksemplar	0 eksemplar	1800 eksemplar		1800 eksemplar		1800 eksemplar		1800 eksemplar		1800 eksemplar	
				4. Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi	0 siaran	0 siaran	10 siaran		10 siaran		10 siaran		10 siaran		10 siaran	
				5. Jumlah portal berita daerah berita magelang.id	0 berita	0 berita	2190 berita		2190 berita		2555 berita		2555 berita		2555 berita	
				6. Jumlah layanan pengaduan	0 siaran	0 siaran	9 siaran		10 siaran		11 siaran		12 siaran		12 siaran	

				Pemerintah Kabupaten Magelang														
		<b>2.10.2</b>	<b>Dise</b>	1.	0 kali	0 kali	12 kali	900.000.000	12 kali	900.000.000	12 kali	900.000.000	12 kali	900.000.000	12 kali	900.000.000	12 kali	4.500.000.000
		<b>.10.1.</b>	<b>mina</b>	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang														
		<b>1.23.3</b>	<b>si informasi melalui media publik</b>	2.	0 kali	0 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	
				Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat														
				3.	0 kali	0 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	
				Jumlah penyebaran Informasi yang														

				bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat														
		<b>2.10.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.23.4</b>	<b>Fasilitas pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik</b>	1. Jumlah website SKPD dan desa/kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	0 SKPD dan desa/kelurahan	0 SKPD dan desa/kelurahan	39 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000	72 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000	105 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000	138 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000	171 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000	171 SKPD dan desa/kelurahan	3.000.000.000
				2. Jumlah pengembangan aplikasi monografi kelurahan	0 aplikasi	0 aplikasi	2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi	

				dan desa, dan websit e portal infor masi														
				3. Jumla h penge mban gan dan pemb erday aan KIM	0 KIM	0 KIM	18 KIM		22 KIM		27 KIM		33 KIM		41 KIM		41 KIM	
		<b>2.14.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.17</b>	<b>Progr am Penge lolaan dan Penge mban gan Statis tik</b>	1. Perse ntase keters ediaa n data statist ik sektor al	0%	78.94 %	100%	950.0 00.00 0	100%	1.010 .000. 000	100%	1.100 .000. 000	100%	1.125 .000. 000	100%	1.200 .000. 000	100%	5.385 .000. 000
				2. Perse ntase data statist ik sektor al yang terint egrasi dalam siste m infor masi	0%	78.94 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

		<b>2.14.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.17.1</b>	<b>Penyusunan dokumen statistik sektoral</b>	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	0 jenis buku	0 jenis buku	9 jenis buku	600.000.000	9 jenis buku	660.000.000	9 jenis buku	750.000.000	9 jenis buku	750.000.000	9 jenis buku	825.000.000	9 jenis buku	3.585.000.000
		<b>2.14.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.17.2</b>	<b>Koordinasipengintegrasian data tingkat Kabupaten</b>	Jumlah data yang terintegrasi	0 data SKPD	0 data SKPD	60 data SKPD	350.000.000	60 data SKPD	350.000.000	60 data SKPD	350.000.000	60 data SKPD	375.000.000	60 data SKPD	375.000.000	60 data SKPD	1.800.000.000
		<b>2.15.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.15</b>	<b>Program Persandian</b>	Perse ntase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Peran gkat Daerah	0%	0%	10%	750.000.000	20%	750.000.000	33%	750.000.000	40%	750.000.000	48%	750.000.000	48%	3.750.000.000
		<b>2.15.2</b> <b>.10.1.</b> <b>1.15.1</b>	<b>Pengelolaan persandian dan telekomunikasi</b>	1. Jumlah saran a dan prasarana persandian dan teleko	0 paket	0 paket	2 paket	750.000.000	2 paket	750.000.000	2 paket	750.000.000	2 paket	750.000.000	2 paket	750.000.000	2 paket	3.750.000.000

				muni kasi													
				2. Jumla h perala tan sandi, berita sandi dan berita teleko muni kasi kedin asan yang terkel ola	0 berit a dan telep on	0 berit a dan telep on	3180 0 berit a dan telep on		3180 0 berit a dan telep on		3180 0 berit a dan telep on		3180 0 berit a dan telep on		3180 0 berit a dan telep on		3180 0 berit a dan telep on
				3. Jumla h pemel ihara n dan perbai kan infras trukt ur jaring an telepo n pemd a kabup aten Magel ang	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket
				4. Jumla h Peran	0 SKPD	0 SKPD	60 SKPD		60 SKPD		60 SKPD		60 SKPD		60 SKPD		60 SKPD

				gkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Peringkat Daerah													
				5. Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi	0 Peraturan	0 Peraturan	1 Peraturan		1 Peraturan		1 Peraturan		1 Peraturan		1 Peraturan		1 Peraturan
				6. Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanannya dan resiko sesuai SOP	0%	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%



			7. Prosentase pelaksanaan Command Center Kabupaten Magelang	0%	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
<b>Jumlah</b>							<b>12.2</b>		<b>12.3</b>		<b>13.0</b>		<b>13.9</b>		<b>14.8</b>		<b>66.4</b>
							<b>10.0</b>		<b>49.3</b>		<b>38.2</b>		<b>93.5</b>		<b>77.4</b>		<b>68.4</b>
							<b>00.0</b>		<b>00.0</b>		<b>30.0</b>		<b>53.0</b>		<b>08.3</b>		<b>91.3</b>
							<b>00</b>		<b>00</b>		<b>00</b>		<b>00</b>		<b>00</b>		<b>00</b>

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja PD yang bersangkutan, yaitu spesifik, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan, dapat dicapai, dan relevan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	<i>Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan</i>		<i>31,28 angka (0-5)</i>	<i>37,26 angka (0-5)</i>	<i>44,52 angka (0-5)</i>	<i>52,44 angka (0-5)</i>	<i>61,56 angka (0-5)</i>	<i>67,81 angka (0-5)</i>	<i>76,67 angka (0-5)</i>	<i>76,67 angka (0-5)</i>

	<i>informasi</i>									
1.2	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik		36,67 angka (0-5)	57,36 angka (0-5)	83,94 angka (0-5)	87,74 angka (0-5)	89,88 angka (0-5)	92,02 angka (0-5)	94,15 angka (0-5)	94,15 angka (0-5)
1.3	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD		40,44 angka (0-5)	41,32 angka (0-5)	48,16 angka (0-5)	56,89 angka (0-5)	70,23 angka (0-5)	84,67 angka (0-5)	98,32 angka (0-5)	98,32 angka (0-5)
1.4	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI		62,50 angka (0-5)	66,67 angka (0-5)	75,00 angka (0-5)	83,33 angka (0-5)	91,67 angka (0-5)	95,83 angka (0-5)	100 angka (0-5)	100 angka (0-5)

Tabel 7.2.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2121	2022	2023	2024	
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi									
	1. Cakupan SKPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	11.71%	23.41%	36.76 %	48.47 %	60.18 %	71.89 %	83.6 %	100%	100%
	2. Cakupan Layanan Komunikasi	72.72%	73%	75%	75%	77%	80%	80%	82%	82%
2	Program Persandian									
	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0%	0.8 %	16.7 %	25%	33.3 %	41.7 %	50%	50%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika									
	1. Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	20.93%	21%	23%	35%	50%	70%	90%	100%	100%

	2. Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	0%	0.20%	0.20%	0.20%	21%	43%	65%	95%	95%
	3. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	0%	17%	35%	52%	64%	76%	82%	90%	90%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik									
	1. Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0%	0%	78.94 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	0%	0%	78.94 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									
	1. Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria	0%	0%	5.8 %	13.62 %	26.45 %	39.27 %	52.09 %	64.91 %	64.91 %
	2. Persentase diseminasi informasi melalui media massa	66.67 %	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	41.67 %	25%	66.66 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	0%	0%	58.33 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	58.33 %	25%	33.33 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	128.22 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	123.81 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	0%	0%	0%	50%	66.67 %	83.33 %	91.67 %	100%	100%

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan diketahui pula oleh stakeholder.



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019 - 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KOTA MUNGKID  
2019**

**RANCANGAN  
RENCANA STRATEGI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KOTA MUNGKID  
2019**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	I-1
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Landasan Hukum .....	I-2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	1-5
1.4    Sistematika Penulisan .....	1-5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG .....	II-1
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-1
2.1.1. Tugas .....	II-1
2.1.2. Uraian Tugas .....	II-2
2.1.3. Fungsi.....	II- 11
2.1.4. Struktur Organisasi.....	II-12
2.2    Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-12
2.2.1    Sumberdaya Manusia .....	II-12
2.2.2    Prasarana dan Sarana .....	II-15
2.3    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-16
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II-22
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	III-1
3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2.    Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati .	III-3
3.3.    Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pusat Statistik dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah .....	III-6
3.4.    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD .....	III-9
3.5.    Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-12

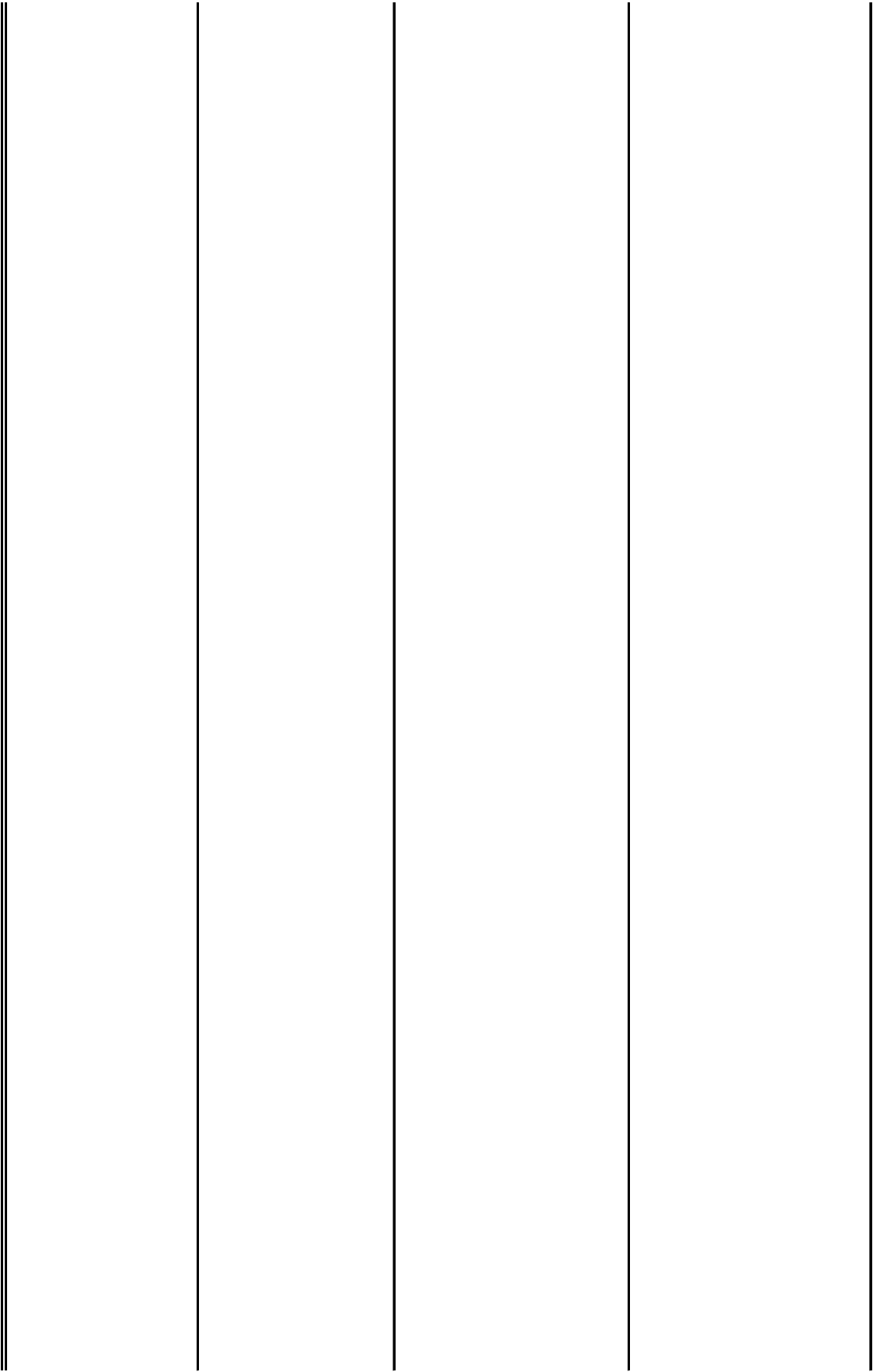


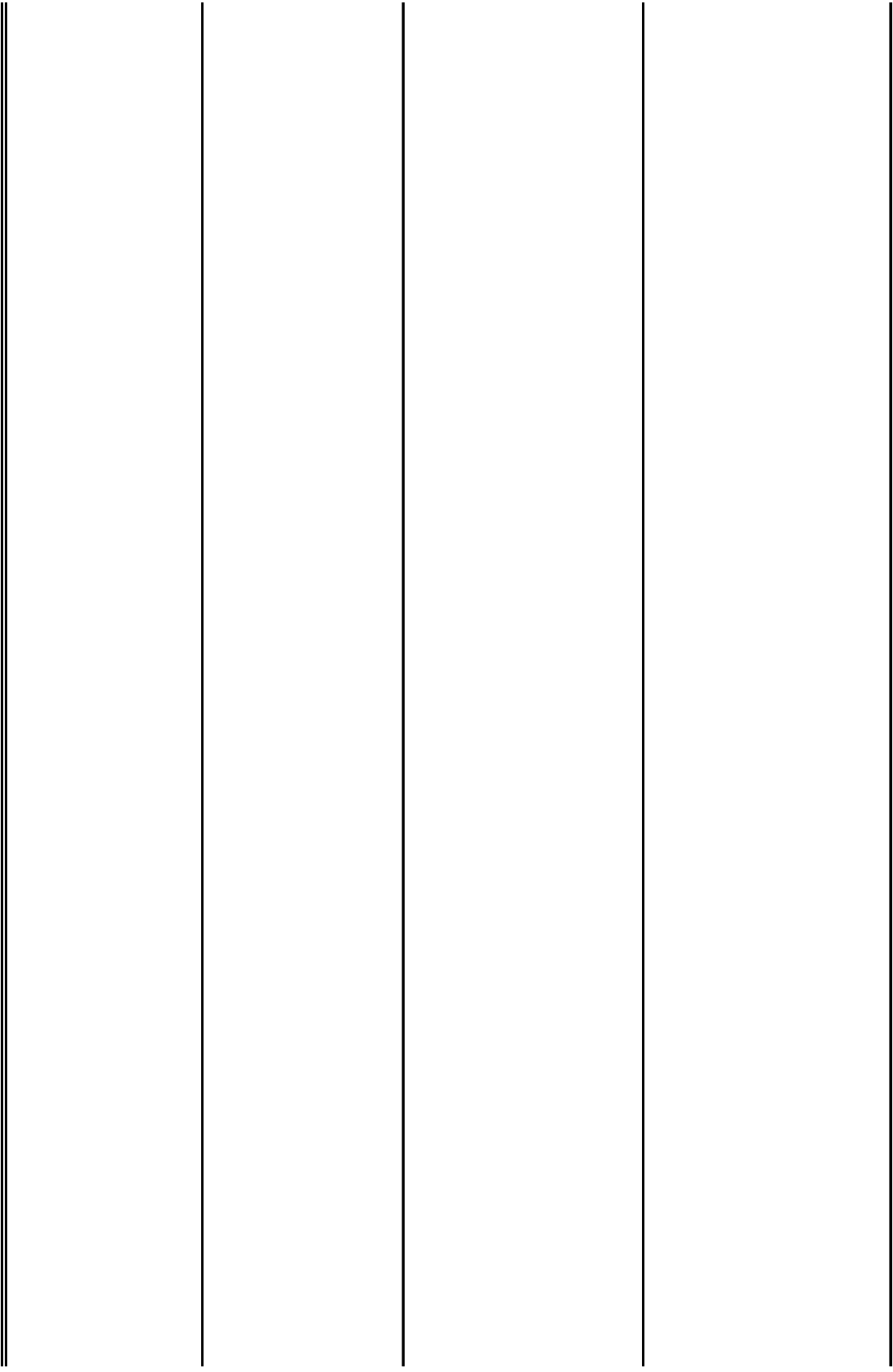
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDAPATAN INDIKATIF .....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP .....	VIII-1

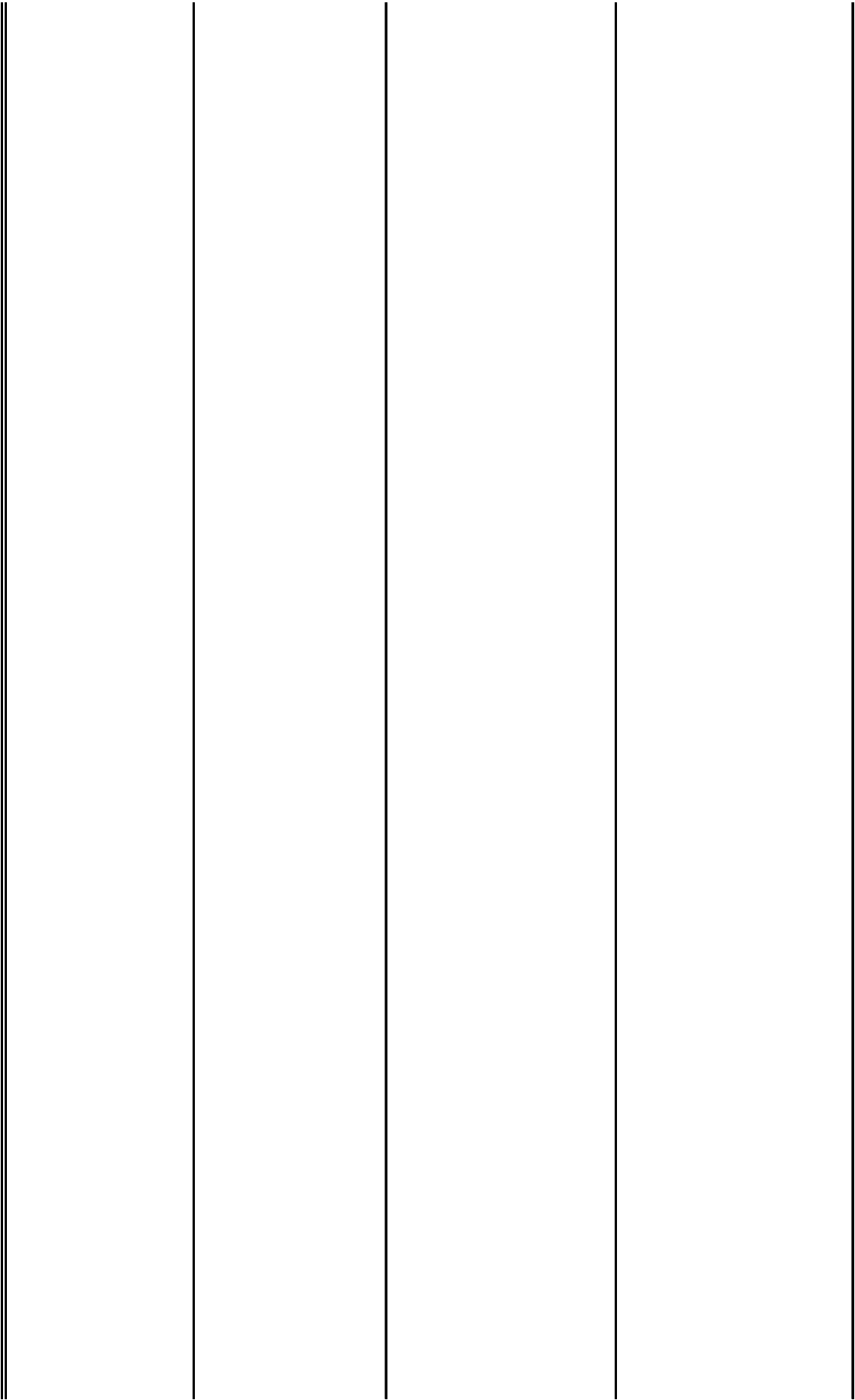
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	SDM Diskominfo Berdasarkan Kelompok Jabatan .....	II-13
Tabel 2.2.	Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang .....	II-13
Tabel 2.3.	SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Menurut Golongan .....	II-14
Tabel 2.4.	SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin .....	II-14
Tabel 2.5.	ASN dengan Latarbelakang Pendidikan IT .....	II-15
Tabel 2.6.	Tenaga Non PNS di Diskominfo dan Tingkat Pendidikan.....	II-16
Tabel 2.7.	Sarana dan Prasarana di Diskominfo.....	II-16
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 .....	II-19
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 .....	II-21
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	III-1
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ...	III-4
Tabel 3.3.	Telaah Rencana Strategis Kementrian Kominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah .....	III-6
Tabel 3.4.	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD .....	III-9
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Kabupaten Magelang.....	IV-1
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dn Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten Magelang.....	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024 .....	VI-2
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.....	VII-1
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-2

VISI	MISI	ISU STRATEGIS	TUJUAN
<p>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)</p>	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</p>	<p>1. Pengembangan implementasi e-Government (SPBE )  2. Pengembangan data center yang didukung jaringan komunikasi data yang aman</p>	<p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p>







--	--	--	--

CASCADING RENST

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	FORMULA TUJUAN	MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Belum optimalnya pelaksanaan e-Government	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi



Cakupan layanan informasi  
bagi Desa dan PD

Cakupan layanan dan  
diseminasi informasi publik

Cakupan pemanfaatan dan  
pengelolaan TI

--	--	--	--	--

TRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

FORMULA SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	MASALAH PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil+Cakupan Layanan Komunikasi+Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah)/3	Belum optimalnya prasarana dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil
				Cakupan Layanan Komunikasi

	Belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar	Penyediaan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar	Program Persandian	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
(Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA+Persentase ketersediaan perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah)/3	Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat	Pengintegrasian sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<p>Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA</p> <p>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK</p> <p>Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah</p>

	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
				Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi
((Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah))/6	Belum optimalnya diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat	Peningkatan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria
				Persentase diseminasi informasi melalui media massa

			Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat
			Cakupan diseminasi melalui media interpersonal
			Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang
			Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah
(Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/2			Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan



				Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar
--	--	--	--	---

## LAMPIRAN I :

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024  
NOMOR : 050/658.a/24/2019  
TANGGAL : 3 JULI 2019

FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN UMUM	NAMA KEGIATAN
$\left( \frac{\text{Jumlah PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil}}{\text{Jumlah PD+Jumlah Desa+Jumlah Kelurahan}} \right) * 100\%$	Belum semua PD, unit kerja PD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana TIK	<b>Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK</b>
	Belum adanya Command Center Kabupaten Magelang sebagai Sarana Pendukung Pengambilan Keputusan Pimpinan		<b>Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center</b>
	Belum Tersedianya Data Center dan Disaster Recovery Center yang sesuai dengan standar		
	Belum terpenuhinya kebutuhan mesin absensi elektronik untuk peningkatan kinerja pegawai		
	Belum tersedianya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Belum optimalnya pengelolaan layanan telekomunikasi kedinasan		
$\left( \frac{\text{Luas wilayah tercoverage}}{\text{Luas wilayah keseluruhan}} \right) * 100\%$	Masih banyaknya wilayah blank spot di Kabupaten Magelang	Meningkatkan upaya fasilitasi pelayanan pembangunan menara telekomunikasi	<b>Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi</b>
	Belum optimalnya pembinaan dan pelayanan perijinan pembangunan menara telekomunikasi dan pemberian rekomendasi izin pendirian menara telekomunikasi baru		
	Belum terpenuhinya target pemungutan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi		

(Jumlah SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah/Jumlah SKPD)*100%	Belum semua Perangkat Daerah menggunakan sandi dalam komunikasi	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi	<b>Pengelolaan persandian dan telekomunikasi</b>
	Belum adanya SDM persandian		
	Belum optimalnya sarana prasarana persandian		
	Belum Tersedianya Sistem Kemanan Jaringan yang sesuai dengan standar		
	Belum terbangunnya tata kelola pemerintahan berbasis persandian		
(Jumlah urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA/Jumlah urusan) * 100%	Belum adanya layanan aplikasi berbasis mobile yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas layanan aplikasi e Government yang terintegrasi	<b>Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD</b>
	Belum optimalnya layanan pengembangan aplikasi terintegrasi pemerintah		
	Belum optimalnya akses internet dan intranet		
(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK daerah yang disusun/Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK daerah)*100%	Belum adanya peraturan TIK yang disusun		<b>Penyelenggaraan ekosistem TIK</b>
	Belum adanya pelaporan kinerja pengelolaan TIK daerah		
((Jumlah website desa yang menggunakan domain dengan ekstension desa.id / jumlah website desa)*100%)+(jumlah skpd yang terfasilitasi DRC/jumlah SKPD)*100%))/2	Belum semua website desa menggunakan domain dengan ekstension desa.id sesuai dengan permen kominfo no 5 tahun 2015		

	Belum optimalnya pengelolaan dan layanan dasar data center dan DRC plan		
(Jumlah data sektoral yang tersedia/Jumlah data sektoral yang seharusnya tersedia)*100%	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Statistika Daerah	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data statistik daerah	<b>Penyusunan dokumen statistik sektoral</b>
	Belum adanya koordinasi terkait pengumpulan data sektoral di SKPD		
(Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi/Jumlah data statistik sektoral yang tersedia)*100%	Belum optimalnya diseminasi data statistik sektoral		<b>Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten</b>
	Terbatasnya SDM di bidang statistik		
	Belum adanya tata kelola statistik sektoral		
	Belum tersedianya sarana dan prasarana statistik		
(((Jumlah website SKPD yang mendapatkan kriteria informatif/Jumlah website SKPD)*100%)+((Persentase website desa dan kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif/Jumlah website desa dan kelurahan)*100%)/2	Belum semua SKPD melaksanakan amanah keterbukaan informasi publik	Meningkatkan upaya layanan keterbukaan informasi publik	<b>Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau</b>
	Belum optimalnya pemanfaatan portal informasi daerah magelangkab.go.id beserta sub-domain OPD dan desa/kelurahan sebagai sarana informasi dan komunikasi publik		
	Belum tersedianya Pusat Layanan Informasi Publik		
((Jumlah diseminasi informasi melalui media radio yang dilaksanakan/Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio yang harus dilaksanakan)*100%+(Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi yang dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi yang harus dilaksanakan)*100%+(Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak majalah yang	Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media radio	Meningkatkan pengelolaan saluran media informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Magelang	<b>Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa</b>
	Perangkat siar LPPL Radio Gemilang sudah tidak memadai		
	Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media televisi		

dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak majalah yang harus dilaksanakan)*100%)/3	Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang		
(Jumlah diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat yang dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat yang harus dilaksanakan)*100%	Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan Kemitraan diseminasi informasi publik oleh Forum Komunikasi Media Tradional melalui Pertunjukan Rakyat		<b>Diseminasi informasi melalui media publik</b>
(Jumlah diseminasi informasi melalui media interpersonal yang dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media interpersonal yang harus dilaksanakan)*100%	Keterbatasan Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat		
(Jumlah diseminasi informasi melalui media luar ruang yang dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media luar ruang yang harus dilaksanakan)*100%	Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang, dan Videotron		
(Jumlah diseminasi informasi melalui media baru portal daerah yang harus dilaksanakan/Jumlah diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah)*100%	Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru portal berita daerah		
	Belum tersedianya Media Center sebagai media jaringan pemberitaan daerah		
(Jumlah KIM yang berkembang/Jumlah Kecamatan)*100%	Terbatasnya Jumlah Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Lembaga Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Magelang	<b>Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik</b>
	Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial		

(Jumlah Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar / Jumlah konten literasi TIK yang seharusnya ada) * 100 %	Belum tersedianya konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar		
--	--	--	--

INFORMATIKA

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN
1. PD, unit kerja PD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	Jumlah PD, unit kerja PD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil
2. Jumlah bandwidth internet yang disalurkan	Jumlah bandwidth internet yang disalurkan
Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center (DRC) dan Infrastruktur TIK	Jumlah paket layanan data center, DRC dan Infrastruktur TIK
1. Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi
2. Jumlah provider menara yang retribusinya terpungut	Jumlah provider menara yang teribusinya terpungut

1. Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi
2. Jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola	Jumlah berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola
3. Jumlah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telepon pemda Kabupaten Magelang	Jumlah paket pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telepon pemda Kabupaten Magelang
4. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
5. Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi	Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi yang dibuat
6. Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai SOP	(Jumlah sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai SOP/Jumlah sistem elektronik yang ada)*100%
7. Prosentase pengguna layanan Command Center Kabupaten Magelang	(Jumlah pengguna layanan Command Center Kab. Magelang /Jumlah stake holder(orang) yang menggunakan layanan Command Center Kab. Magelang)*100%
1. Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi	Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi
2. Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK yang dibuat
1. Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain	Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain
2. Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang	Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang
3. Pengelolaan penilaian indeks SPBE	Hasil penilaian indeks SPBE



Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun
Jumlah data yang terintegrasi	Jumlah data PD yang terintegrasi
Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Ketentuan Dibidang Cukai Tembakau	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi ketentuan cukai tembakau
1. Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	Jumlah jam/hari pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang
2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio	Jumlah kegiatan diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio
3. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang	Jumlah eksemplar diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang

4. Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi	Jumlah siaran melalui media televisi
5. Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id	Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id
6. Jumlah layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah siaran pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang
1. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang
2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat
3. Jumlah penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat	Jumlah penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat
1. Jumlah website SKPD dan desa /kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	Jumlah PD dan desa /kelurahan yang memiliki website mendapat kriteria cukup informatif
2. Jumlah pengembangan aplikasi monografii kelurahan dan desa, dan website portal informasi	Jumlah aplikasi monografii kelurahan dan desa, dan website portal informasi

3. Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM
---	--